

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Forbes. (1986). *Geografi Keterbelakangan (Sebuah Survei Kritis)*. Jakarta: LP3ES.
- Furqon. 2001. *Statistika Terapan dalam Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*.
- Hutomo, Sigit. (2014). *Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2)*. Universitas AtmaJaya: Jurnal Kinerja, Volume 18, No.1, Hal 32-44.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Depkeu.
- Kuncoro, Mudrajad Ph. D. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, Voni. (2014). *Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013*. Universitas Negeri Surabaya.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI.
- Musgrave, Richard A. 1959. *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw Hill.
- Nadia Baladraf. (2015). *Pengaruh Pengalihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak*

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo. Skripsi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Nurana, Anggun Ciptasari. (2010). *Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah di Kawasan Ciayumajakuning.*

Prima, Riyan. (2013). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Indonesia.* Skripsi, Padang: Universitas Andalas.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach,* 3th ed. New York, NY: John Wiley and Sons.

Sekaran, Uma. 2007. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis,* edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2010. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV.Afabeta.

Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi Dengan SPSS.* Yogyakarta: Andi.

Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Supadmi, Ni Luh. (2006). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan.* Jurusan Akuntansi, Universitas Udayana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah.*

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia,* Edisi Revisi, SalembaEmpat, Jakarta.

Wijaya, Gusti Ngurah Dwi Purna.(2014). *Pengaruh Desentralisasi Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Wirasatya, Komang Yogi, dan Made Yenni Latrini. (2012). *Pengaruh Desentralisasi BPHTB terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Badung*. Universitas Udayana.

